

Peran Perencanaan Pembangunan Dalam Menghadapi Era Globalisasi

Oleh Jaka Sriyana¹

Pendahuluan

Isu globalisasi dunia mulai merebak pada tahun 1980-an, yang ditandai dengan berbagai perubahan yang sangat cepat di berbagai bidang kehidupan sosial, budaya, ekonomi dan aspek aspek terkait lainnya. Proses globalisasi terjadi dewasa ini mengakibatkan keadaan ekonomi dunia saat ini sangat berbeda dengan kondisi ekonomi yang diproyeksikan oleh para ahli pada masa lalu. Barangkali hanya sedikit pemikir ekonomi yang memperkirakan akan jatuhnya sistem ekonomi sosialis dan runtuhnya negara-negara penganut paham tersebut.

Di tengah hingar bingarnya masyarakat Barat (Eropa dan Amerika) menyambut gelombang globalisasi, masyarakat di negara berkembang dihadapkan pada sejumlah tantangan besar sebagai eksekusi dari proses tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir ini sangat terasa perubahan yang begitu cepat dan fundamental telah membawa kita pada keadaan yang penuh dengan ketidakpastian (*uncertainty*). Kondisi ini tentu saja akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan negara, masyarakat dan para pelaku bisnis di Indonesia. Keadaan ini sering kali menjadi pemicu adanya ketidakstabilan dan ketidakseimbangan dalam berbagai bidang kehidupan.

Dalam gegap gempitanya luapan kegembiraan masyarakat Eropa dan Amerika atas runtuhnya sistem sosialisme dan menangnya sistem kapitalisme, tampak muncul optimisme (yang berlebihan ?) bahwa sistem

pasar terbuka akan mampu menyelesaikan semua, seakan-akan peranan pemerintah (perencanaan pemerintah) melalui berbagai kebijakannya harus dikurangi

Pembangunan ekonomi dan perencanaan pembangunan

Pembangunan ekonomi diartikan sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakat (Lincoln A, 1990). Dengan demikian dapat dipahami bahwa pembangunan ekonomi merupakan proses kegiatan yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu negara meningkat dalam jangka panjang. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pembangunan ekonomi memiliki pengertian :

1. Suatu proses, yang berarti perubahan yang terjadi terus-menerus dalam suatu negara.
2. Usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita dan kesejahteraan masyarakat.
3. Kenaikan pendapatan per kapita dan kesejahteraan itu harus berlangsung terus dalam jangka panjang.

Untuk tercapainya tujuan-tujuan dalam proses pembangunan tersebut diperlukan adanya suatu perencanaan yang matang dan menyeluruh. Di sinilah perlunya suatu perencanaan pembangunan bagi suatu negara. Hingga saat ini belum ada suatu kesepakatan tentang definisi perencanaan pembangunan itu. Namun demikian dapat diambil pemikiran bahwa perencanaan pema-

¹Adalah Dosen tetap Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

ngunan adalah pengendalian dan pengaturan perekonomian negara dengan sengaja oleh pemerintah pusat untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan. Adanya perencanaan pembangunan, khususnya di negara berkembang akan menjadi stimulan dalam proses pembangunan tersebut. Disamping itu akan lebih menjamin tercapainya keseimbangan di tingkat makro ekonomi negara.

Globalisasi ekonomi dan tantangannya terhadap negara-negara berkembang

Pada saat ini, di tengah masyarakat dunia telah merasakan akibat globalisasi dunia di berbagai bidang, ternyata perekonomian dunia masih tidak menguntungkan bagi kelompok negara berkembang (Kelompok Selatan). Perekonomian dunia masih nampak ditandai oleh jurang yang semakin lebar antara negara maju dan negara berkembang dalam berbagai aspek ekonomi. Masalah ini dinilai oleh beberapa ahli ekonomi sebagai faktor utama "proses marginalisasi" kelompok negara berkembang dalam proses globalisasi dewasa ini. Kondisi perekonomian dunia dewasa ini semakin ditandai oleh unsur-unsur ketidakpastian dan ketidakadilan bagi negara berkembang. Semakin tampak pula bahwa kelompok negara berkembang terus dihantui oleh ketidakpastian dalam berbagai hal: harga-harga, nilai kurs, tingkat bunga, yang tentunya akan bermuara pada ketidakseimbangan perekonomian dalam negeri. Data-data mengenai kondisi perekonomian dunia dapat dilihat pada tabel 1, sebagaimana dilaporkan dalam IMF, *World Economic Outlook May 1994*.

Data dari IMF pada tabel 1. tersebut menunjukkan bahwa negara industri menguasai 55.7% dari PDB dunia dan 75.7% ekspor barang dan jasa dunia. Keadaan ini menunjukkan pula betapa kelompok negara industri yang berjumlah 23 negara telah menjadi pusat kegiatan perekonomian dunia

yang terdiri atas 209 negara. Kelompok negara berkembang yang berjumlah 130 negara hanya menyumbang 33.4% dari PDB dunia dan 20.3% ekspor barang dan jasa, sedangkan negara terbelakang, yang sejumlah 24 negara hanya 10.9% PDB dunia dan 4.0% ekspor barang dan jasa.

Lebih menarik lagi kalau kita amati kondisi perekonomian antara kelompok utara (negara maju) dan kelompok selatan yang dilaporkan pada tabel 2. Pada tabel tersebut digunakan ukuran pendapatan perkapita dan jumlah penduduk. Dapat diketahui bahwa kelompok utara yang terdiri atas 39 negara perkapita sangat tinggi dengan jumlah penduduk hanya 15.1% dari penduduk dunia dan menguasai 79.6 PNB dunia. Sedangkan kelompok Negara Selatan yang meliputi 128 negara hanya menguasai 11.5% PNB dunia dengan jumlah penduduk 75.9% dari penduduk dunia. Kondisi demikian ini memang tidak lepas dari proses perubahan ekonomi dunia dewasa ini.

Proses globalisasi telah mengakibatkan perekonomian negara-negara berkembang khususnya, semakin terbuka dan dipengaruhi oleh volume perdagangan dunia (ekspor dan impor). Menurut data World Bank, 1995, dijelaskan bahwa pada tahun 1993 di sejumlah 66 negara porsi ekspor telah mencapai 35% atau lebih dari PDB, 31 negara lainnya mencapai 25%-34%; dan 26 negara mencapai 20%-24% dari PDB. Kondisi ini menunjukkan bahwa perekonomian sebagian besar negara di dunia semakin ditentukan oleh tingkat hubungan/perdagangan dengan negara lainnya. Pada kenyataannya negara industri memiliki peluang ekspor yang jauh lebih besar dibandingkan dengan negara berkembang. Hal ini disebabkan oleh struktur ekonomi mereka yang memang didominasi oleh sektor industri. Masalahnya adalah bagaimana posisi negara berkembang dalam menghadapi masalah tersebut? Mampukah kelompok negara berkembang ini merebut pangsa pasar dunia

Tabel 1
Gambaran Dominasi Kelompok Negara Industri
Menurut PDB dan Ekspor Barang serta Jasa
Pada Tahun 1990
(Dalam %)

Negara	Jumlah Negara	Total PDB		Total Ekspor Barang & Jasa	
		Kelompok Negara Industri	Dunia	Kelompok Negara Industri	Dunia
Negara Industri	23,0	100,0	55,7	100,0	75,7
Amerika Serikat		38,6	21,5	18,0	13,7
Jepang		15,3	8,6	11,7	8,9
Jerman		8,2	4,6	13,7	10,3
Perancis		6,9	3,9	9,7	7,3
Italia		6,5	3,6	6,5	4,9
Inggris		6,4	3,6	9,9	7,5
Kanada		3,6	2,0	4,0	3,1
Lain-lain	16,0	14,4	8,0	26,5	20,1
Kelompok Negara Industri					
G-7	7,0	85,6	47,7	73,5	55,6
Uni Eropa	12,0	36,2	20,2	55,3	41,9

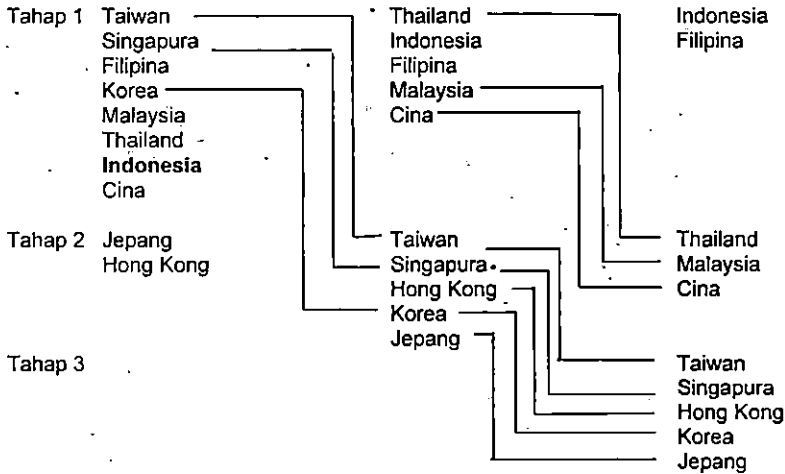
Sumber : Dorojatun K. Jakti, 1995, hal.55, yang mengutip dari IMF, World Economic Outlook May, 1994

Tabel 2
Gambaran kesenjangan Ekonomi Global Menurut
Tingkat PNB Per Ka pada Tahun 1993
(Dalam US Dollar, Juta orang, dan %)

Pengelompokan Menurut Tingkat PNB Per Kapita*	Jumlah Perekonomian		PNB		Penduduk		PNB Per kapita (US\$)
	Unit	%	Juta US\$	%	Juta Orang	%	
(Kelompok selatan)	(128)	(61)	(2.800.000)	(11.5)	(4.193)	75.9	
Rendah	59	28	1.165.000	4.8	3.094	56.0	380
Menengah bawah	69	33	1.635.000	6.7	1.099	19.9	1.490
Menengah Atas (Kelompok Utara)	42	20	2.153.000	8.9	498	9.0	4.320
Tinggi	39	19	19.304.000	79.6	834	15.1	23.150
Total Dunia	209	100	24.257.000	100.0	5.525	100.0	4.390

Catatan : Kelompok Pendapatan-Rendah:US\$695 atau kurang ; Menengah-Bawah US\$ 696-US\$2.785; Menengah Atas: US\$ 2.786-US\$ 8.625; dan Tinggi: US\$ 8.626 atau lebih
Sumber : Dorojatun K. Jakti, 1995, hal. 56, yang mengutip dari IMF, World Economic Outlook May, 1994

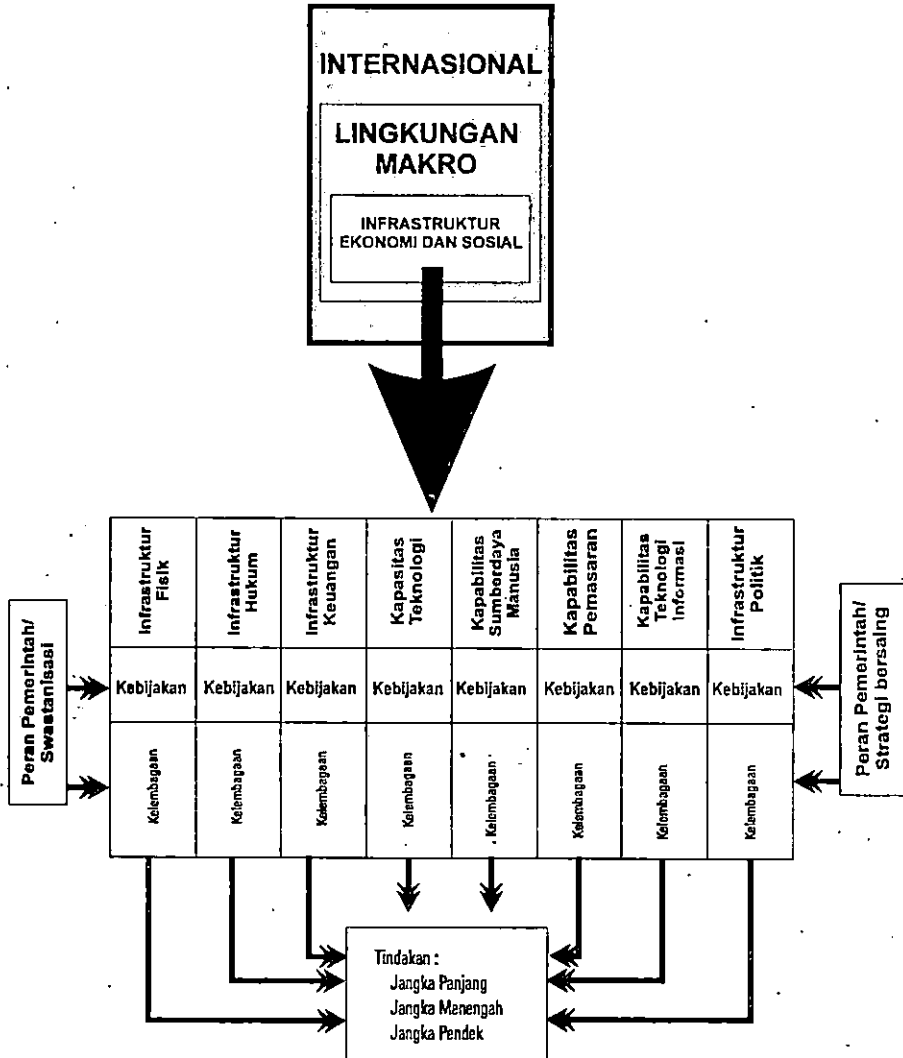
Gambar 1
Tahapan Pemanfaatan Teknologi Untuk Industri di Berbagai Negara Asia



Tahap 1 menggambarkan tahapan paling awal yang ditandai oleh peranan manufaktur pertanian dan padat karya yang masih dominan dan mendominasi ekspor.
Tahap 2 dicirikan oleh perkembangan peat dan output dan ekspor produk industri seperti consumer electronics, baja, dan suku cadang kendaraan bermotor.
Tahap 3 beralih ke produk-produk teknologi tinggi dan padat modal seperti barang-barang modal atau jasa-jasa finansial, komunikasi dan perdagangan

Sumber : Faisal H. Basri, 1995, hal 31

Gambar 2.
Kerangka Konseptual Penguatan Infrastruktur
Dalam Industrialisasi



Sumber : Faisal H Basri, 1995, Hal 225

lebih besar lagi? Untuk menjawab permasalahan tersebut perlu dilakukan analisis yang mendalam, berkaitan dengan struktur ekonomi negara berkembang itu sendiri serta strategi ekspor yang tepat. Hal ini tentu saja akan menentukan proses perencanaan ekonomi masing-masing negara tersebut.

Beberapa masalah penting yang dihadapi Indonesia

Sebagai negara berkembang yang sedang giat membangun, Indonesia memiliki beberapa masalah utama ekonomi yang harus diselesaikan. Dengan adanya globalisasi ekonomi menjadikan masalah yang dihadapi semakin sulit diselesaikan. Hal ini disebabkan adanya unsur ketidakpasatian pada perekonomian dunia dan "*bargaining power*" yang rendah sebagai akibat proses tersebut.

Untuk menghadapi proses globalisasi tersebut, tak pelak lagi Indonesia harus menggalakkan ekspor. Berkaitan dengan masalah ini, faktor-faktor yang harus dikembangkan adalah :

1. Pemanfaatan teknologi yang lebih maju
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
3. Penyediaan jaringan infrastruktur
4. Kemudahan birokrasi
5. Penggalan sumber dana untuk investasi
6. Perbaikan struktur pasar dalam negeri

Dewasa ini Indonesia merupakan salah satu dari dua negara yang masih tertinggal dalam pemanfaatan teknologi majudalam proses industrialisasi (Gambar 1). Kondisi ini tentu saja sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah yang dilakukan pada masa lalu. Oleh karena itu perlu adanya satu komitmen dari pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan ini, yang selanjutnya dituangkan dalam suatu kebijakan. Masalah kualitas sumber daya manusia tidak kalah penting dengan teknologi karena hal ini akan berkait erat dengan penguasaan teknologi tersebut. Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh pemerintah. Jaringan infrastruktur menjadi

masalah yang sangat penting pula karena akan menentukan kesuksesan proses industrialisasi. Birokrasi pada umumnya dipengaruhi oleh kemampuan aparat pemerintah dituntut untuk lebih efisien dalam era sekarang ini. Sumber dana investasi harus digali seluas mungkin untuk mengembangkan industri. Hal lain yang perlu diperhatikan struktur pasar dalam negeri. kondisi pasar yang bersifat monopoli menyebabkan produsen merasa lebih enak dan enggan untuk bersaing di pasar luar negeri. Semua masalah tersebut harus diselesaikan melalui perencanaan yang matang dan kebijakan yang tepat dan menyeluruh dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk menggambarkan proses ini dijelaskan pada gambar 2.

Perencanaan ekonomi dalam menghadapi globalisasi ekonomi.

Permasalahan mendasar tentang keseimbangan ideal antara peranan pemerintah dan mekanisme pasar dalam pengelolaan sistem perekonomian meliputi dua hal, yaitu dimensi kepemilikan sumber daya (*Resources Ownership*) dan dimensi alokasi sumber daya (*Resources Allocation*). Persoalan pertama lebih berkaitan dengan persoalan non ekonomis, yaitu persoalan politik dan ideologi. Ketentuan-ketentuan permasalahan ini akan berkait pada batas-batas normatif diantara kepemilikan perorangan (*private property*) dan kepemilikan negara. Permasalahan yang kedua berkaitan dengan permasalahan yang bersifat ekonomis karena di sinilah peran mekanisme pasar akan dipertandingkan dengan peranan pemerintah, khususnya perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mencari pola alokasi sumber daya yang optimal bagi sebuah perekonomian negara. Permasalahan pokok dalam hal ini adalah mencari pola yang ideal dalam proses penyediaan barang swasta dan barang publik bagi kesejahteraan masyarakat. Proses pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah berkaitan dengan kedua masalah

ini akan bermuara pada bentuk sistem ekonomi yang terjadi pada masa selanjutnya. Keterkaitan kedua permasalahan tadi dan kondisi sistem ekonomi dapat dilihat pada gambar 3.

Sebagai akibat dari proses globalisasi, negara-negara berkembang berusaha untuk melakukan integrasi ke dalam proses tersebut, yaitu dengan jalan membuka katup-katup perekonomiannya dalam proses menuju sistem perekonomian yang lebih liberal. Dalam sistem ini kepemilikan swasta dan mekanisme pasar menjadi tiang utama dalam proses pengambilan keputusan bagi pelaku ekonomi. Dalam kenyataannya proses transisi ke arah sistem yang berlandaskan pada mekanisme pasar menuntut dua hal. *Pertama* adalah pengurangan perencanaan pemerintah dengan berbagai kebijakan intervensinya untuk meningkatkan peranan pasar. *Kedua* adalah proses peralihan kepemilikan sumber daya dari tangan negara ke tangan swasta, baik sebagai perorangan maupun perusahaan. Gabungan kedua hal inilah yang dinamakan liberalisasi.

Syarat sukses proses liberalisasi di suatu negara agaknya sulit untuk dipenuhi oleh sebagian besar negara berkembang karena kondisi struktur ekonomi dan politik dalam negeri masing-masing negara belum terpenuhi. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu (Lihat juga Dorodjatun K. Jakti, 1995):

1. Adanya aparat pemerintah yang profesional dan mempunyai komitmen kuat pada permasalahan tersebut.
2. Adanya dukungan politik yang kuat dari pemerintah.
3. Adanya konsensus nasional yang mendukung tujuan serta cara-cara pelaksanaan liberalisasi tersebut.
4. Adanya informasi dan data yang akurat dalam perencanaan untuk mendukung proses liberalisasi yang menyangkut sektor, golongan dan wilayah yang ditargetkan.

Dengan melihat empat syarat tersebut, dimungkinkan sekali banyak negara berkembang yang tidak mampu menghadapi gelombang globalisasi dalam pengelolaan perekonomiannya, sebab proses globalisasi sering menimbulkan gejolak di dalam negeri masing-masing negara. Namun begitu perencanaan pemerintah tetap merupakan elemen yang sangat penting dalam proses pembangunan, khususnya bagi negara berkembang dalam menghadapi proses globalisasi dunia saat ini. Ada beberapa alasan yang dapat dikemukakan berkaitan dengan hal tersebut, yaitu :

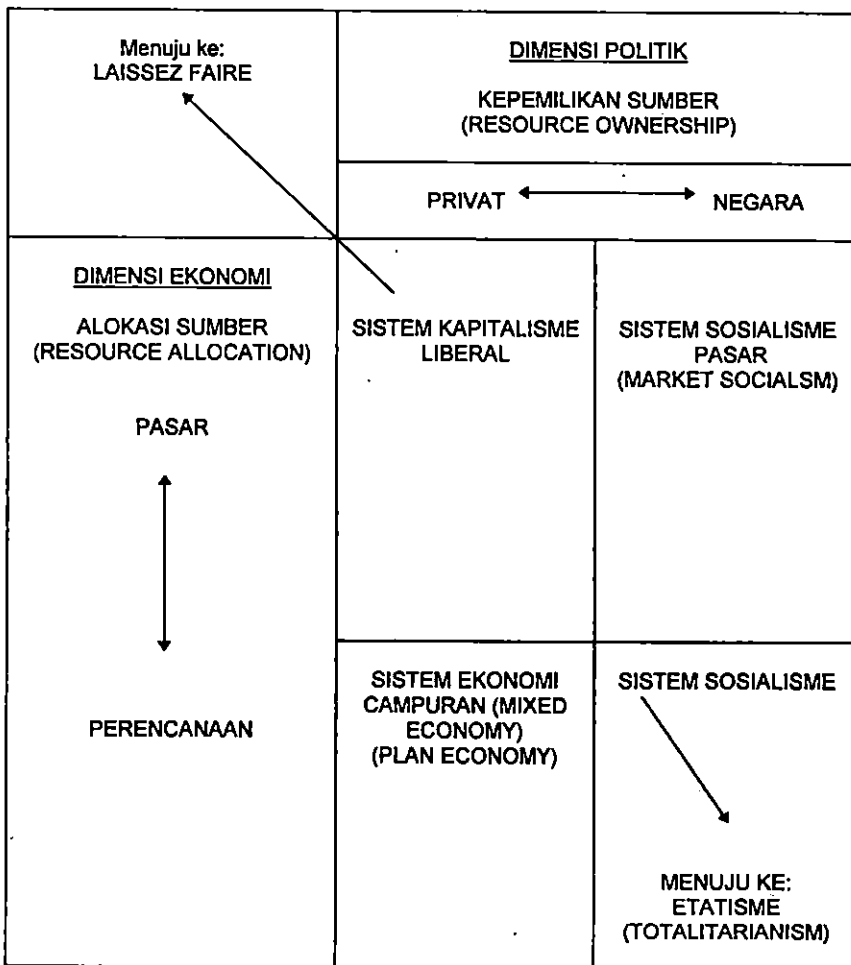
1. Pembangunan bukan merupakan proses yang seketika (*instant*) dan otomatis.
2. Adanya eksternalitas dalam proses pembangunan tersebut.
3. Perekonomian modern dalam era informasi memerlukan data yang akurat dalam pengambilan keputusan.
4. Globalisasi sering menimbulkan adanya kondisi ketidakpastian yang harus dihadapi.
5. Kebutuhan akan jaringan infrastruktur dan barang publik yang semakin besar seiring dengan proses pembangunan ekonomi.
6. Adanya masalah ekonomi yang harus diselesaikan dalam proses pembangunan bagi suatu negara yang tidak bisa diselesaikan melalui mekanisme pasar.

Tujuan pembangunan ekonomi akan tercapai dengan syarat adanya suatu perencanaan yang cermat. Kebijakan-kebijakan ekonomi yang dilakukan sebagai implementasi dari perencanaan tersebut harus konsisten dengan tujuan yang ditargetkan. Begitu juga konsistensi antara tujuan, sasaran dan target kebijakan pemerintah harus diwujudkan.

Khusus bagi Indonesia, peranan pemerintah dan khususnya perencanaan pembangunan harus mendapat perhatian pemerintah karena komitmen politik nasional yang tertuang dalam UUD 1945. Indonesia

Gambar 3

Empat Tipe Ideal Sistem Politik : Dilihat dari Perspektif Ekonomi



Sumber : Dorijatun K. Jakti, 1995, hal 65

yang sudah berumur lebih dari 50 tahun, yang di dalamnya terkandung perencanaan demi perencanaan harus mampu mengantisipasi gelombang globalisasi yang semakin erat mencengkram di berbagai bidang kehidupan.

Todaro, Michael P.,(1996), *Development Planning*, Oxford University Press.

Penutup

Proses globalisasi kiranya tidak bisa dihindari dalam kehidupan ekonomi setiap negara. Sebagai satu negara yang hidup di antara banyak negara di dunia, Indonesia harus mampu mengantisipasi tantangan yang datang sebagai akibat proses tersebut. Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan melakukan suatu bentuk perencanaan pembangunan nasional yang mencakup dan mengakomodasi semua kepentingan dan permasalahan yang timbul pada masa yang akan datang.

Daftar Pustaka

- Arsyad, Lincolin,(1993), *Pengantar Perencanaan Ekonomi*, MW Mandala, Yogyakarta.
- Basri, Faisal H.,(1995), *Perekonomian Indonesia Menjelang Abad XXI : Distorsi, Peluang dan Kendala*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Jakti, Dorodjatun K.,(1995), *Perencanaan Ekonomi Nasional Menghadapi Tantangan Globalisasi, Dalam Alumni FE-UI dan Tantangan Masa Depan*, Gramedia Pustaka Utama.
- Jinghan, M.L., (1990), *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, Terjemahan, Rajawali Press, Jakarta.
- Lewis, Arthur W.,(1996), *Development Planning : The Essentials of Economic Policy*, Unwin University Books, George Allen and Unwin Ltd.